

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Eropa terlihat saling menguntungkan. Nyatanya, arus perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar terutama terkait industri *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia, yaitu kebijakan Directive (EU) 2018/2001 atau Renewable Energy Directive (RED II) yang secara resmi diberlakukan pada Desember 2018.¹ Tujuan akhirnya adalah untuk melarang impor minyak kelapa sawit yang tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan produk turunannya ke Uni Eropa.² Uni Eropa telah lama dikenal sebagai aktor penting dalam perumusan dan penyebaran norma internasional, memainkan peran sebagai *norm entrepreneur* yang aktif membangun, mempromosikan, dan menginternalisasi standar-standar baru dalam isu global, termasuk dalam keberlanjutan lingkungan dan perdagangan. Melalui kebijakan RED II ini, Uni Eropa mendorong norma penggunaan energi terbarukan dengan membatasi peran minyak kelapa sawit berdasarkan alasan keberlanjutan.³

Kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen utama, Uni Eropa juga memperhatikan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin lainnya yang memproduksi kelapa sawit. Namun, karena Indonesia dan Malaysia telah meningkatkan produksi minyak kelapa sawit

¹ European Parliament and of the Council, "Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council," 2018.

² European Parliament, "European Parliament Resolution of 4 April 2017 on Palm Oil and Deforestation of Rainforests," 2017.

³ Bustanul Arifin, Komang Audina, dan Permana Putri, "Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest," *Andalas Journal of International Studies*, VIII.2 (2019), 203–23.

sejak tahun 1970-an yang diperkirakan menguasai sekitar 90 persen dari produksi minyak kelapa sawit dunia, maka Uni Eropa lebih berkonsentrasi pada posisi Indonesia dan Malaysia dalam kebijakan tersebut.⁴ Keberatan datang dari pemerintah Indonesia terhadap inisiasi dari kebijakan tersebut.⁵ Alasan utama dari keberatan tersebut adalah karena kebijakan Uni Eropa menyatakan untuk mempromosikan penggunaan minyak *rapeseed* atau minyak bunga matahari, yang menurut penelitian juga membawa dampak yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, dan jenis tanaman tersebut memiliki produksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan total lahan yang digunakan.⁶ Selain itu, dengan adanya sertifikasi tunggal dapat menentang keberadaan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil) yang telah dibuat untuk sertifikasi produk berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan industri ini telah memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Indonesia dari sektor ekspor pertanian dalam satu dekade terakhir.⁷ Indonesia merupakan pemasok utama minyak kelapa sawit dunia, memproduksi 43 juta ton pada tahun 2018, atau menyumbang 62% dari produksi global.⁸ Konsumsi minyak sawit dunia cenderung meningkat sebesar 9,66% per tahun, sementara pertumbuhan produksi minyak sawit dunia hanya 7,94% per tahun.⁹ Karena

⁴ European Parliament (2017).

⁵ Syahrul Alam dan Mansur Juned, "Ban of Indonesia's Palm Oil Products to the European Union and Indonesia's Diplomacy Efforts," *European Modern Studies Journal*, 6.3 (2022), 54–62.

⁶ Siti Zainurrahmi Br Bangun, Taufik Hidayat, dan Akim, "The European Union Trade Protection on Indonesian Crude Palm Oil (CPO) Import," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3.1 (2020), 1–14.

⁷ Jundika C. Kurnia et al., "Advances in biofuel production from oil palm and palm oil processing wastes: A review," *Biofuel Research Journal*, 3.1 (2016), 332–46.

⁸ Alif Dani Herlambang et al., "The Implications of Indonesia's Shift in Palm Oil Exports from the European Union to China: a World-Systems Theory," *Liaison Journal of Best*, 2.1 (2023), 33–50.

⁹ Arifin, Audina, and Putri (2019).

meningkatnya permintaan, produksi dan ekspor CPO Indonesia juga meningkat. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia semakin meluas pasarnya, dan tren yang ada menunjukkan bahwa industri kelapa sawit saat ini tidak hanya berfokus pada permintaan pasar Asia atau Amerika Serikat, tetapi juga pasar Eropa.¹⁰ Uni Eropa menjadi negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia terbesar kedua pada tahun 2017 sebesar 16,19% dari total ekspor, berada hanya setelah India yang mencapai 24,57%.¹¹ Selain itu, Uni Eropa merupakan salah satu pasar alternatif utama untuk ekspor minyak sawit Indonesia, terutama untuk beberapa negara seperti Belanda, Italia, dan Spanyol.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui RED II, Uni Eropa secara tegas membatasi ekspor minyak kelapa sawit mentah Indonesia yang masuk ke wilayahnya.¹² Hal ini berdampak pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa. Sejak kebijakan RED II mulai diterapkan pada tahun 2018, ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari Indonesia ke sejumlah negara anggota Uni Eropa seperti Belanda, Spanyol, dan Italia mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan data, ekspor CPO ke Belanda yang sebelumnya mencapai 1.428,6 ton pada tahun 2017 menurun drastis menjadi hanya 392,8 ton pada tahun 2023, atau turun sebesar 72,5%. Hal serupa juga terjadi pada ekspor ke Spanyol, yang menurun dari 1.377,5 ton di tahun 2017 menjadi 655,1 ton pada tahun 2023, mencerminkan penurunan sebesar 52,44%. Di

¹⁰ Dian Widyaningtyas dan Tri Widodo, “Analisis Pangsa Pasar Dan Daya Saing CPO Indonesia Di Uni Eropa,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 18.2 (2017), 138–45.

¹¹ GAPKI, “Memecah Rekor : Ekspor Minyak Sawit 2017 Tembus US\$ 22,9 Miliar,” *Gapki.id*, 2018 <<https://gapki.id/news/2018/02/02/memecah-rekor-ekspor-minyak-sawit-2017-tembus-us-229-miliar/>> [diakses 19 Februari 2025].

¹² Muhammad Yassar Naufal Subagja et al., “Dampak Pemberlakuan Kebijakan RED II Uni Eropa terhadap Ekspor CPO dan Implikasinya pada Perekonomian Nasional,” *Journal of Administrative and Social Science*, 6.1 (2025), 1–12.

Italia, ekspor CPO juga berkurang signifikan dari 1.128,5 ton pada 2017 menjadi 401,4 ton pada 2023, setara dengan penurunan 64,43%.¹³

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu jalur yang dipilih oleh Indonesia dalam menghadapi kebijakan ini. Diplomasi ekonomi menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.¹⁴ Melalui pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 29 Oktober 2019, disebutkan bahwa penguatan diplomasi ekonomi dilakukan dengan enam langkah strategis: 1) kapitalisme penguatan pasar domestik; 2) penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional; 3) penguatan perundingan perdagangan dan investasi; 4) promosi terpadu perdagangan serta mendorong Outbound Investment; 5) Diplomasi akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia; dan 6) mendorong ekonomi 4.0 meliputi industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya alam. Selanjutnya diperjelas dalam strategi kelima, Menteri Retno memfokuskan diplomasi ekonomi tersebut tentang sikap Indonesia yang menolak berbagai tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit produksi Indonesia, "Kepentingan kelapa sawit Indonesia adalah hal fundamental...".¹⁵ Pernyataan resmi Menlu Retno tersebut mengisyaratkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia telah menjadi fokus utama diplomasi Indonesia. Inilah yang kemudian membuat diplomasi ekonomi Indonesia menjadi hal yang hangat dan layak untuk dipertanyakan, terutama terkait isu kelapa sawit ini.

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS), "Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023," *bps.go.id*, 2024 <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAyNiMx/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama--2012-2022.html>> [diakses 19 Februari 2025].

¹⁴ TEMPO, "Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024," *tempo.co*, 2019 <<https://www.tempo.co/internasional/menlu-retno-sebut-4-1-prioritas-politik-luar-negeri-ri-2019-2024-690517>> [diakses 15 Februari 2025].

¹⁵ TEMPO.

Sebelum mengajukan gugatan kepada World Trade Organization (WTO) terhadap Uni Eropa atas pembatasan minyak kelapa sawit pada 9 Desember 2019,¹⁶ Indonesia telah melakukan berbagai upaya lain diantaranya isu ini dibawa ke Pertemuan Tingkat Menteri ke-4 Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).¹⁷ Bahkan sebelum pertemuan tersebut, Indonesia juga turut berkontribusi dalam membuat surat keberatan bahkan sebelum kebijakan tersebut diresmikan pada Desember 2018. Upaya Indonesia terus berlanjut melalui regulasi yang dikenal dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).¹⁸ Selain itu, dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, masalah seputar minyak kelapa sawit telah mendominasi negosiasi karena dapat menjadi penghalang bagi terjadinya CEPA.¹⁹

Berdasarkan *literature review* dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik kebijakan Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit, peneliti menemukan bahwa penelitian yang secara spesifik membahas isu ini dalam konteks diplomasi ekonomi masih sedikit ditemukan. Kemudian terkait teori dan konsep yang digunakan, kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan teori perdagangan internasional dan teori merkantilisme, dan beberapa menggunakan *green theory*. Sehingga masih sedikit penelitian yang secara spesifik menggunakan konsep diplomasi ekonomi, khususnya berdasarkan tahapan diplomasi ekonomi menurut Kishan S. Rana.

¹⁶ World Trade Organization (WTO), European Union - Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels: Request For Consultations by Indonesia, 2019, hal. 1–9.

¹⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Joint Communiqué - Fourth Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries,” in *Ekon.Go.Id*, 2017, hal. 5–6.

¹⁸ Dinda Maylinda Suhendra, “Government Strategies for Palm Oil Trade Disputes After the 2021 Crude Palm Oil Phase-Out Policy,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23.1 (2024), 1–12.

¹⁹ Hugh Speechly dan Saskia Ozinga, *Indonesian-EU palm oil trade and consumption*, Fern, 2019.

1.2 Rumusan Masalah

RED II yang diberlakukan oleh Uni Eropa pada 11 Desember 2018 menyebabkan pembatasan ekspor minyak sawit karena dianggap sebagai penyebab utama deforestasi dan perubahan iklim. Kebijakan ini melahirkan keberatan dari pemerintah Indonesia sebagai negara yang menyumbang 62% dari produksi minyak kelapa sawit global, terutama karena industri kelapa sawit ini telah menjadi sumber pendapatan Indonesia terbesar dari sektor ekspor pertanian dalam satu dekade terakhir. Serta pada tahun 2017, Uni Eropa menjadi negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit terbesar kedua setelah India. Diberlakukannya RED II ini menyebabkan penurunan signifikan ekspor minyak kelapa sawit mentah Indonesia ke negara-negara anggota Uni Eropa seperti Belanda, Spanyol, dan Italia. Menyikapi hal ini, diplomasi ekonomi Indonesia dipertanyakan terutama karena diplomasi ekonomi menjadi fokus utama politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disampaikan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dilakukan melalui enam langkah strategis dengan penekanan pada sikap Indonesia yang menolak tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit produksi Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah dan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit menggunakan konsep diplomasi ekonomi menurut Kishan S. Rana yang diidentifikasi menjadi empat tahapan yaitu *economis salesmanship, economic networking and advocacy, image building* dan *regulatory management and resource mobilization*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan masyarakat luas, terutama bagi mahasiswa Hubungan Internasional, mengenai diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi Renewable Energy Directive (RED II) dari Uni Eropa yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi para pemangku kepentingan nasional, dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka pertama yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal berjudul “*Indonesia’s Economic Diplomacy in Facing RED (Renewable Energy Directive) and European Union Palm Oil Policy*” ditulis oleh Edyana Isnan dalam Majalah *Journal of Islamie Finance and Management*

(2022).²⁰ Artikel ini menyatakan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam menanggapi RED II menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara kebijakan lingkungan dan perdagangan internasional. Artikel menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit Indonesia, khususnya pembatasan Uni Eropa terhadap bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit karena masalah lingkungan seperti deforestasi dan emisi gas rumah kaca.

Artikel juga membahas bahwa meskipun Uni Eropa berfokus pada keberlanjutan, komoditas lain seperti kedelai dan daging sapi merupakan kontributor yang lebih signifikan terhadap deforestasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Tanggapan strategis Indonesia, termasuk penerapan sertifikasi ISPO dan pembentukan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI), menunjukkan upaya-upaya untuk mempromosikan praktek-praktek keberlanjutan sekaligus menentang klaim-klaim Uni Eropa. Selain itu, tindakan hukum pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa menggarisbawahi urgensi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dalam konteks dinamika perdagangan global.

Studi pustaka kedua berjudul “*The Garuda Strikes Back Indonesian Economic Diplomacy to Tackle European Union Protectionism on Crude Palm Oil*” oleh Mohammad Ichlas El Qudsi, Indra Kusumawardhana, Volodymyr Kyrychenko dalam *Journal of International Studies on Energy Affairs* (2020).²¹ Artikel ini mengulas bagaimana Indonesia menggunakan diplomasi ekonomi

²⁰ Edyana Isnan, “Indonesia’s Economic Diplomacy in Facing Red (Renewable Energy Directive) and European Union Palm Oil Policy,” *Majalah Journal of Islamic Finance and Management*, 2.1 (2022), 110–28.

²¹ Mohammad Ichlas El Qudsi, Indra Kusumawardhana, dan Volodymyr Kyrychenko, “The Garuda Strikes Back : Indonesian Economic Diplomacy to Tackle European Union Protectionism on Crude Palm Oil,” *Journal of International Studies on Energy Affairs*, 1.2 (2020), 110–35.

secara agresif dalam menghadapi kebijakan proteksionis Uni Eropa terhadap ekspor CPO Indonesia dengan menitikberatkan pada tiga elemen utama yaitu penggunaan pengaruh politik dan hubungan bilateral, pemanfaatan aset ekonomi negara, serta konsolidasi iklim politik dan lingkungan internasional. Pendekatan diplomasi ekonomi ini diaplikasikan Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di pasar Eropa yang penting, dengan melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintah, korporasi besar, dan badan internasional.

Secara keseluruhan, artikel ini menggambarkan bagaimana Indonesia berusaha mempertahankan ekspor minyak sawitnya melalui diplomasi ekonomi yang tegas di tengah kebijakan proteksionis Uni Eropa yang berbasis argumentasi lingkungan. Studi ini memperlihatkan bagaimana negara berkembang dengan komoditas strategis memanfaatkan instrumen diplomasi untuk melindungi kepentingan nasionalnya dalam menghadapi persaingan dan tekanan di pasar global yang semakin kompleks.

Studi pustaka ketiga berjudul *“Ban of Indonesia’s Palm Oil Products to the European Union and Indonesia Diplomacy Efforts”* oleh Syahrul Salam dan Mansur Juned dalam *European Modern Studies Journal* (2022).²² Artikel ini memberikan telaah kritis mengenai larangan Uni Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia dengan membingkainya sebagai sengketa perdagangan yang kompleks dan bukan sebagai isu lingkungan yang sederhana. Mereka menyoroti motivasi Uni Eropa dan menunjukkan bahwa larangan tersebut didorong oleh kepentingan ekonomi lokal yang bertujuan untuk melindungi pasar

²² Alam and Juned (2022).

minyak nabati, khususnya minyak biji bunga matahari, bukan semata-mata untuk mengatasi masalah lingkungan terkait dengan produksi minyak kelapa sawit.

Artikel menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara dengan para ahli dan tinjauan literatur untuk mengeksplorasi tanggapan diplomatik Indonesia, seperti tindakan hukum di WTO dan pembatasan ekspor dengan menekankan implikasi yang lebih luas bagi keamanan ekonomi Indonesia dan pasar minyak kelapa sawit. Artikel ini juga menempatkan konflik tersebut dalam konteks hubungan internasional, diplomasi publik, dan keberlanjutan dengan menggarisbawahi ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kebijakan lingkungan dalam dinamika perdagangan global.

Studi pustaka keempat berjudul “*An Analysis of President Joko Widodo’s Economic Diplomacy From 2014 to 2024: Results in Foreign Investment and Global Trade Volume*” by Asep Setiawan dalam *Action Research Literate* (2024).²³ Artikel ini menganalisis strategi diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024 dengan fokus pada efektivitasnya dalam meningkatkan volume perdagangan Indonesia, menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment/*FDI), dan mengatasi tantangan ekonomi global. Dengan mengkaji inisiatif-inisiatif utama, artikel ini mengeksplorasi interaksi antara perjanjian perdagangan, reformasi regulasi, dan kemitraan internasional yang membentuk lintasan ekonomi Indonesia.

Kerangka teori artikel ini berakar pada konsep diplomasi ekonomi yang mencakup penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk memajukan kepentingan nasional. Diplomasi ekonomi melibatkan

²³ Asep Setiawan, “An Analysis of President Joko Widodo’s Economic Diplomacy From 2014 To 2024: Results in Foreign Investment and Global Trade Volume,” *Action Research Literate*, 8.12 (2024), 3495–3500.

negosiasi perjanjian perdagangan, menarik FDI, dan meningkatkan kemitraan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengaruh geopolitik. Artikel ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Presiden Joko Widodo telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam posisi ekonomi Indonesia. Artikel ini berkontribusi pada bidang diplomasi ekonomi internasional dengan memberikan analisis yang komprehensif mengenai strategi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Artikel ini memberikan wawasan terkait bagaimana reformasi domestik, perjanjian perdagangan internasional, dan kemitraan strategis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Studi pustaka terakhir berjudul “*The Strategy of Indonesia’s Economic Diplomacy in Building Mandalika Special Economic Zone 2017-2021*” oleh Aulia Rahmatin Masyhuri dalam *Indonesian Perspective* (2023).²⁴ Artikel ini memberikan analisis komprehensif mengenai strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dari tahun 2017 hingga 2021 dengan menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan empat tahapan diplomasi ekonomi dari Kishan S. Rana, yaitu: *economic salesmanship, economic networking, image building, dan regulatory management and resource mobilization*.

Artikel ini menyoroti pentingnya strategis KEK Mandalika dalam meningkatkan pariwisata, khususnya pariwisata olahraga, dan menarik investasi dengan fokus pada peran badan usaha milik negara seperti Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam mengelola KEK. Artikel ini menggarisbawahi kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam

²⁴ Aulia Rahmatin Masyhuri dan Witri Elvianti, “The Strategy of Indonesia’s Economic Diplomacy in Building Mandalika Special Economic Zone (2017-2021),” *Indonesian Perspective*, 8.2 (2023), 236–62.

mempromosikan kepentingan ekonomi dan mengatasi tantangan seperti promosi yang tidak memadai dan kualitas infrastruktur. Selain itu, artikel ini menekankan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi dan memberdayakan masyarakat lokal, serta merinci pembangunan infrastruktur yang signifikan dan kemitraan internasional yang bertujuan untuk memosisikan Mandalika sebagai tujuan wisata olahraga utama. Temuan-temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas diplomasi ekonomi Indonesia dan menawarkan implikasi praktis bagi para pembuat kebijakan dan investor.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Diplomasi Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai memprioritaskan diplomasi ekonomi sebagai agenda utama dalam kegiatan diplomatik mereka.²⁵ Bayne dan Woolcock mendefinisikan diplomasi ekonomi baru sebagai kegiatan yang berkaitan dengan metode dan proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara.²⁶ Dalam tulisan “The New Economic Diplomacy: Decision-making and Negotiation in International Economic Relations” pada tahun 2007, Bayne dan Woolcock menekankan bahwa diplomasi ekonomi mencakup penggunaan berbagai instrument ekonomi seperti perjanjian perdagangan, investasi, bantuan luar negeri, dan sanksi ekonomi untuk mencapai tujuan nasional.²⁷

²⁵ Masyhuri dan Elvianti.

²⁶ Pantri Muthriana Erza Killian, “Economic Diplomacy as A Subject and Research Agenda : Practical , Conceptual and Methodological Issue,” *Global Strategies*, 1, 2015, 51–78.

²⁷ Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, *The New Economic Diplomacy*, 2007.

Kishan S. Rana dalam tulisannya yang berjudul “Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries” pada tahun 2007 mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai suatu proses di mana negara-negara berinteraksi dengan dunia luar untuk mengoptimalkan keuntungan nasional dengan memanfaatkan peluang ekonomi secara maksimal mereka dalam berbagai bidang aktivitas, termasuk perdagangan, investasi, serta berbagai bentuk pertukaran ekonomi yang menguntungkan.²⁸ Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Rana tersebut, secara konsep diplomasi ekonomi bertujuan untuk mengoptimalkan kondisi eksternal suatu negara dengan cara mendorong perdagangan dan investasi yang memberikan manfaat bagi negara tersebut. Dengan kata lain, inti dari diplomasi ekonomi adalah memperkuat posisi negara melalui aktivitas-aktivitas seperti perdagangan.

Dalam melihat diplomasi ekonomi, Rana memiliki empat tahapan yang dapat diidentifikasi sebagai cara negara-negara berkembang untuk maju dalam menangani diplomasi ekonomi. Tahapan-tahapan ini terjadi bersamaan, dalam arti bahwa ketika melangkah ke tahap yang lebih tinggi, negara-negara melanjutkan tindakan yang dilakukan pada tahap sebelumnya.²⁹

1. *Economic Salesmanship*

Negara akan mengembangkan hubungan ekonomi baru melalui diplomat di luar negeri untuk memperkenalkan negara tersebut di tingkat internasional. Melalui duta besar atau diplomat, beberapa negara akan fokus untuk mempromosikan potensi negara, baik dengan mengeksport komoditas dasar atau

²⁸ Kishan S Rana, “Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries”, *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiations in International Relations*, 2007, 201–20.

²⁹ Kishan S Rana, “Economic Diplomacy : A Developing Country Perspective,” 2018, 1–15.

mengembangkan pasar baru. Hal ini dilakukan untuk menjajaki prospek ekonomi baru dengan memperkenalkan potensi dan kemampuan negara untuk membuka peluang ekspansi ke luar negeri.

2. *Economic Networking and Advocacy*

Negara akan melakukan koordinasi antara pemerintah sebagai aktor negara dan swasta sebagai aktor non-negara. Pemerintah akan tetap menjadi fasilitator dan aktor utama dalam diplomasi ekonomi, namun memberikan wadah dan kesempatan kepada aktor non-negara untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam proses ini. Hal ini dilakukan untuk memobilisasi investasi asing langsung (FDI) dan membantu perusahaan-perusahaan domestik untuk berkembang. Dalam hal ini, sektor swasta domestik sangat bermanfaat dalam membantu memperluas jaringan, biasanya dengan membangun hubungan dengan sektor swasta asing, seperti melalui penyelenggaraan acara antar-sektor swasta.

3. *Image Building*

Negara akan mulai meningkatkan merek nasionalnya untuk kemajuan ekonomi. Misalnya, di sektor pariwisata, negara akan menciptakan merek nasional di sektor pariwisata yang akan bermanfaat bagi perekonomian. Untuk meraup keuntungan ekonomi, diperlukan promosi brand negara tersebut melalui keberadaan slogan. Selain itu, merek ini akan dipromosikan melalui pemasaran citra, misalnya, di sektor pariwisata yang membutuhkan penyajian negara sebagai tujuan, infrastruktur berkualitas tinggi, dan logistik untuk industri pariwisata. Hal ini juga diakui dengan adanya koordinasi antara negara dan sektor swasta dalam memasarkan industri ini melalui keikutsertaan mereka dalam pameran dan acara internasional lainnya.

4. *Regulatory Management and Resource Mobilization*

Fase ini akan melibatkan kegiatan seperti perencanaan dan negosiasi perjanjian atau peraturan dan diplomasi regional melalui pembentukan kelompok-kelompok baru dan inovatif. Pada fase ini, negara akan membangun citra modern yang membutuhkan koalisi domestik antara aktor negara dan non-negara untuk berkolaborasi dalam memajukan kepentingan ekonomi negara. Fase ini juga mengakui pembentukan standar/kebijakan baru dan melibatkan entitas bisnis, lembaga pemikir, dan LSM dalam proses negosiasi eksternal. Kementerian Luar Negeri akan bertanggung jawab untuk memimpin dan memberikan saran mengenai tindakan bersama yang akan diambil, seperti di sektor pendidikan, pariwisata, dan media publik.

Tabel 1. 1 Operasional Konsep Diplomasi Ekonomi

Tahapan	Aspek
1. <i>Economic Salesmanship</i>	1. Promosi ekspor 2. Pengembangan pasar baru
2. <i>Economic Networking and Advocacy</i>	1. Kemitraan antar instansi dan aktor 2. Keterlibatan dalam forum multilateral
3. <i>Image Building</i>	1. Promosi citra 2. Keberadaan slogan
4. <i>Regulatory Management and Resource Mobilization</i>	1. Negosiasi perjanjian internasional 2. Pembentukan kebijakan baru

Sumber: Rana (2018) diolah kembali oleh peneliti

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian untuk membantu peneliti dalam menemukan jawaban pertanyaan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode kualitatif sendiri adalah pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada analisis informasi dengan memanfaatkan sumber data baik berupa tulisan maupun informasi lisan dari objek yang dapat diamati secara langsung.³⁰ Penelitian deskriptif analisis dilakukan guna menggambarkan serta mendapatkan pemahaman lanjutan atau tambahan tentang suatu isu atau fenomena yang sudah ada. Setelah dilakukan deskripsi dan analisis, ditemukan tahapan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit.

1.8.2 Batasan Penelitian

Peneliti menentukan batas-batas penelitian agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipahami tujuan penelitiannya. Berkaitan dengan hal ini, peneliti memberi batasan penelitian berdasarkan dua aspek, yakni batasan waktu dan batasan fenomena yang dikaji dalam penelitian. Batasan fenomena atau isu dari penelitian ini adalah diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi RED II Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit. Sementara batasan waktu yang dipilih oleh peneliti adalah dimulai dari tahun 2019 yakni saat RED II mulai berlaku setelah ditetapkan pada Desember 2018, dan dibatasi hingga 2024, masa akhir pemerintahan Joko Widodo yang menjadikan diplomasi ekonomi sebagai prioritas utama politik luar negeri.

³⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam konteks penelitian, konsep unit analisis dipahami sebagai objek atau aktor yang perilakunya menjadi fokus utama untuk dianalisis, yang dalam istilah penelitian sering disebut sebagai variabel dependen. Di sisi lain, unit eksplanasi merujuk pada fenomena, faktor, atau masalah yang berperan sebagai penyebab atau pengaruh terhadap perilaku unit analisis tersebut. Sementara level atau tingkatan analisis merujuk pada posisi unit yang menjadi fokus penelitian, yang dapat berupa individu, kelompok, negara, wilayah regional, atau bahkan sistem internasional. Penetapan tingkat analisis ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mudah menguraikan dan memperjelas batasan serta ruang lingkup penelitian secara detail.³¹

Dalam penelitian ini, unit analisis yang dijadikan fokus utama kajian ialah diplomasi ekonomi Indonesia, sementara unit eksplanasi yang mempengaruhi perilaku unit analisa adalah dampak Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit terhadap Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini akan menekankan analisis di level sistem internasional, dikarenakan keinginan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi RED Uni Eropa, baik secara domestik maupun internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lebih tepatnya melalui studi pustaka. Sumber data didapatkan dari pengumpulan jurnal, dokumen, buku, laporan, situs terpercaya

³¹ Mohtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

serta sumber lain yang tervalidasi untuk menunjang data terkait. Data dicari pada laman Google Scholar dengan penggunaan kata kunci “Economic Diplomacy” AND “RED II” AND “Indonesia” AND “European Union” AND “Palm Oil”. Ahli yang menekankan pentingnya penggunaan kata kunci yang efektif dalam pencarian literatur adalah John W. Creswell. Dalam sebuah diskusi tentang metodologi pencarian literatur, Creswell menyoroti pentingnya mengidentifikasi kata kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencarian literatur.³²

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara terperinci dan mendalam. Data sekunder yang sebelumnya telah didapatkan oleh peneliti dari studi pustaka, terutama melalui jurnal, berita, buku, dan berbagai laporan terkait, kemudian peneliti olah dengan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.³³

1.8.5.1 Data reduction

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan selama penelitian. Langkah ini sangat penting untuk mengelola kompleksitas data kualitatif dan memastikan bahwa data tersebut tetap relevan dengan pertanyaan penelitian. Dari pembatasan tahun 2019-2024 didapatkan total lebih dari 564 artikel, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini. Dari angka tersebut peneliti

³² John W. Creswell dan J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Writing Center Talk over Time*, Fifth Edit (London: SAGE Publication, 2018).

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

memperkecilnya menggunakan kode atau kata kunci “Economic Diplomacy”, “RED II”, “Indonesia”, “European Union”, “Palm Oil”. Sehingga menggunakan kode atau kata kunci ini dihasilkanlah 44 sumber yang akan digunakan sebagai literatur bacaan.

1.8.5.2 Data display

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan kerangka konseptual diplomasi ekonomi menurut Kishan S. Rana, dengan meninjau tahapan diplomasi ekonomi yang terdiri dari *economic salesmanship*, *economic networking and advocacy*, *image building*, serta *regulatory management and resource mobilization* yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi RED II Uni Eropa. Dengan melakukan metode *Open Coding* dan *Axial Coding*, penyajian data dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia menghadapi RED II Uni Eropa melalui tahapan-tahapan tersebut.

1.8.5.3 Conclusion drawing/verification

Penarikan kesimpulan melibatkan penafsiran data yang telah dianalisis untuk merumuskan wawasan dan memverifikasi temuan terhadap kumpulan data asli. Langkah ini memastikan bahwa kesimpulan didasarkan pada bukti empiris. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi RED II Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit.

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang dari topik penelitian, memfokuskan pada urgensi mengapa topik ini perlu atau menarik untuk dibahas menjadi sebuah penelitian. Selanjutnya pada bab ini, terdapat rumusan masalah sebagai bentuk

penyederhanaan dari latar belakang; pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini; tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini; serta, manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini.

BAB II Diplomasi Ekonomi dan Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Bab ini membahas diplomasi ekonomi Indonesia sebagai prioritas utama politik luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian akan diarahkan pada industri minyak kelapa sawit Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pasar global serta kontribusi signifikan terhadap negara sebagai penyumbang pendapatan ekspor utama dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di bab ini juga akan dibahas mengenai Uni Eropa sebagai tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

BAB III Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa

Bab ini akan membahas secara khusus mengenai kebijakan Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa yang memuat latar belakang lahirnya kebijakan, dampak kebijakan, serta bagaimana respon yang diberikan Indonesia terhadap kebijakan tersebut.

BAB IV Diplomasi Ekonomi Indonesia Menghadapi Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa Terkait Minyak Kelapa Sawit

Bab ini akan berisikan analisis diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit berdasarkan empat tahapan menurut Kishan S. Rana yaitu *economis salesmanship, economic networking and advocacy, image building* dan *regulatory management and resource mobilization*.

BAB V Penutup

Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan ini berisikan inti sari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, yang kemudian diharapkan akan menunjukkan tahapan diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit.

